

Aksi Damai Diam di depan Istana Presiden – Kamisan ke-72  
**JSKK** Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan  
Jl. Bonang IA, Menteng, Jakarta Pusat 12870 Telp. 021-31931181 Fac. 021-3913473

=====

Nomor : 39/Surat Terbuka\_JSJKK/VII/2008

Hal : **Permohonan tindak lanjut Pertemuan Presiden dan Korban Pelanggaran HAM :  
Pelaksanaan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM**

Kepada Yth.

**Bapak H. Soesilo Bambang Yudhoyono  
Presiden Republik Indonesia**

Di- Jakarta

*Dengan hormat,*

Melalui surat ini kami kembali datang menghadap Bapak Presiden untuk memberitahukan bahwa berkas penyelidikan Komnas HAM terhadap tragedi :

1. Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II telah menggantung di Kejaksaan Agung selama 6 (enam) tahun.
2. Tragedi Kerusuhan Mei'98 telah menggantung di Kejaksaan Agung selama 5 (lima) tahun.
3. Tragedi Penghilangan Orang Secara Paksa telah menggantung di Kejaksaan Agung selama 1 tahun.

Meskipun pada tanggal 26 Maret 2008 Bapak Presiden telah mengeluarkan kebijakan dan solusi untuk mewujudkan bagi korban pelanggaran HAM, namun, dengan berbagai alasan Kejaksaan Agung menghindari dari kewajiban untuk melalui penyidikan.

Selanjutnya, Pemilu 2009 sudah diambang pintu, orang-orang yang seharusnya bertanggungjawab terhadap berbagai tragedi pelanggaran HAM dengan terang-terangan berkampanye untuk menduduki era kekuasaan Pemilu 2009. Masalah HAM telah dan bakal dijadikan kedok oleh para politisi busuk dalam kampanye-kampanyenya dengan memutarbalikkan fakta. Mestinya hal ini jangan sampai terjadi atau berlanjut, dan harus dicegah. Untuk itu kami mohon agar Bapak Presiden segera bertindak untuk mewujudkan terbentuknya Pengadilan HAM ad-hoc seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tentang Pengadilan HAM.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan komitmen Bapak Presiden untuk menuntaskan tragedi pelanggaran HAM berat secara adil, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Juni 2008

Hormat kami,

**Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan**

**Sumarsih**

**Suciwati**

**Bejo Untung**

Tembusan:

1. Bpk. Menteri Sekretaris Negara RI
2. Bpk. Ketua Komnas HAM